BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 443 - 449 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.6010 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Desa Sebagai Faktor Pendukung Tata Kelola Ekonomi Desa yang Berkelanjutan di Desa Jaranguda

M.Khayrul Reza Simbolon[1], Fadila Khairunnisa Hasibuan[2], Siti Khirani Azzahra[3], Abima Dwiki Rukmana[4], Sapri[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan
e-mail: [1]rezasimbolon812@gmail.com, [2]fadilakhairunn@gmail.com, [3]skhiraniazzahra@gmail.com, [4]bimdr354@gmail.com, [5]sapri@uinsu.ac.id

Abstrak

Pelayanan administrasi merupakan fungsi dasar pemerintah desa dan prasyarat bagi tata kelola desa, termasuk tata kelola ekonominya. Artikel ini menguraikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada 28 Juli sampai 31 Agustus 2026, dengan fokus pada dukungan terhadap pelayanan administrasi desa dan penguatan ekonomi warga. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data dari observasi partisipatif, dokumentasi, dan laporan harian KKN. Hasil menunjukkan empat bentuk kontribusi: (1) bantuan penginputan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) sebanyak sekitar 300 data selama kurang lebih dua minggu; (2) bantuan pelayanan kepada warga, yaitu penyaluran bantuan sosial bersama perangkat desa dan bantuan pekerjaan kantor desa; (3) penguatan keterampilan ekonomi warga melalui sosialisasi UMKM dan pelatihan pembuatan sabun; dan (4) pembangunan kedekatan dengan pemerintah desa dan warga melalui kegiatan sosial-keagamaan dan kepemudaan. Warga menyampaikan bahwa kegiatan ini membantu dan mempermudah aktivitas mereka. Kontribusi mahasiswa bersifat pendukung dan tidak diukur secara kuantitatif, sehingga keberlanjutannya bergantung pada komitmen pemerintah desa.
***Kata kunci**: Pelayanan Administrasi Desa, Tata Kelola Desa, SPPT PBB, UMKM, KKN*

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan formal, tetapi juga urusan adat, agama, dan budaya setempat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang oleh Hardi dkk. [1] dipandang sebagai langkah pembaruan manajemen dan tata kelola pemerintahan pada tingkat paling kecil. Peran utama pemerintah desa adalah melayani masyarakat, sehingga aparatur desa perlu mampu menjalankan pelayanan publik, terutama pelayanan administrasi [2]. Kinerja kepala desa dalam pelayanan publik pun telah menjadi objek kajian tersendiri [3].

Kualitas pelayanan administrasi berkaitan erat dengan tata kelola. Hardi dkk. [1] menemukan bahwa penyelenggaraan administrasi di Desa Rantau Asem berjalan baik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, didukung oleh kualitas aparatur, sarana yang memadai, dan keterlibatan warga dalam musyawarah desa. Namun, penelitian yang sama mencatat keterbatasan sarana dan prasarana, terutama pemanfaatan internet yang belum maksimal. Temuan berbeda diperoleh Waruwu dkk. [4] di Desa Hilibadalu, yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa belum berjalan maksimal. Kasus Desa Pematang Johar juga menunjukkan bahwa inovasi layanan administrasi berbasis aplikasi tidak berjalan

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 443 - 449 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.6010 ***e*-ISSN : 2807-6907**

optimal karena kemampuan warga menggunakan aplikasi tersebut terbatas, yang pada gilirannya menghambat tata kelola desa [5], [6].

Dari sisi pengelolaan dokumen dan prosedur, Ferlita dkk. [7] melaporkan bahwa pengarsipan yang masih manual dan tidak terstruktur di Desa Sidamukti menyulitkan pengelolaan dokumen, dan pendampingan penataan arsip meningkatkan pemahaman aparatur serta mempermudah pencarian data dan mempercepat pelayanan. Astuti dkk. [8] menemukan bahwa di Desa Gantarang, kepastian layanan masih terkendala prosedur tertulis yang belum lengkap, arsip yang dominan manual, dan rekapitulasi register yang belum rutin. Kajian lain membahas pengelolaan arsip desa [9], pemasangan SOP layanan [10], serta kualitas pelayanan administrasi dan kepuasan masyarakat [11]. Pada layanan pajak, Munanto [12] mencatat bahwa pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh perangkat desa di Kabupaten Tegal cukup baik tetapi belum optimal, dengan kendala berupa terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia perangkat desa serta beban kerja yang relatif besar.

Pelayanan administrasi yang tertib juga relevan bagi ekonomi desa. Data kependudukan, data pajak, dan dokumen desa yang rapi menjadi dasar perencanaan dan pertanggungjawaban program. Di sisi lain, penguatan ekonomi warga memerlukan keterampilan produktif. Sundari dkk. [13] menunjukkan bahwa KKN di Desa Kuala Bhee, Aceh Barat, melalui pelatihan pembuatan sabun cuci piring, memberi keterampilan baru, membuka wawasan peluang usaha, dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga. Pelatihan pembuatan sabun untuk pemberdayaan warga dan UMKM juga dilakukan di berbagai komunitas lain [14], [15]. Dengan demikian, pelayanan administrasi dan penguatan usaha warga dapat dipandang sebagai dua sisi dari tata kelola ekonomi desa yang berkelanjutan.

Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, menjadi lokasi KKN penulis. Desa ini terdiri dari empat dusun. Bertani merupakan mata pencaharian utama warga, dan kegiatan pertanian sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi potensi ekonomi utama desa. Di kantor desa, pekerjaan administrasi seperti pengolahan data pajak berjalan dengan ritme santai tanpa tenggat tetap, menurut keterangan perangkat desa. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan (1) kegiatan KKN yang mendukung pelayanan administrasi Desa Jaranguda, (2) kegiatan penguatan ekonomi warga, dan (3) kontribusi serta keterbatasan kegiatan tersebut bagi tata kelola ekonomi desa yang berkelanjutan.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan dan penulisan artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan artikel adalah menggambarkan proses dan hasil kegiatan secara utuh di lapangan, sejalan dengan penelitian tata kelola desa yang juga memakai metode deskriptif kualitatif [1], [4], [8].

Kegiatan dilaksanakan di Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, selama 35 hari, yaitu 28 Juli sampai 31 Agustus 2026. Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) observasi partisipatif, karena penulis terlibat langsung dalam kegiatan bersama perangkat desa dan warga; (2) dokumentasi berupa foto kegiatan dan arsip kegiatan; dan (3) laporan harian KKN yang mencatat kegiatan pada hari ke-1 sampai ke-35.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan mereduksi catatan harian, mengelompokkan kegiatan berdasarkan kaitannya dengan pelayanan administrasi dan ekonomi desa, menyajikannya dalam uraian, tabel, dan gambar, lalu menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kegiatan

Selama 35 hari, kegiatan KKN dikelompokkan menjadi lima kategori berdasarkan kaitannya dengan pelayanan administrasi dan tata kelola ekonomi desa.

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 443 - 449 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.6010 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Tabel 1. Pengelompokan kegiatan KKN di Desa Jaranguda

Kategori	Kegiatan	Waktu (hari ke-)
Koordinasi dan penerimaan oleh pemerintah desa	Sosialisasi dengan warga dan pengurus masjid; pertemuan dengan perangkat desa; penyerahan surat mengajar ke sekolah; pembukaan KKN di kantor desa; penutupan KKN	1, 2, 7, 35
Dukungan pelayanan administrasi	Penginputan data SPPT PBB (sekitar 300 data); membantu perangkat desa di kantor desa	10 dan sekitar dua minggu setelahnya; 30
Pelayanan kepada warga	Persiapan dan penyaluran bantuan sosial bersama perangkat desa dan kelompok KKN lain	22
Penguatan ekonomi warga	Sosialisasi UMKM dan pelatihan pembuatan sabun bersama ibu-ibu	10
Kegiatan sosial, keagamaan, kepemudaan, dan lingkungan	Senam bersama lansia, mengajar mengaji, perwiritan, rapat dan lomba bersama karang taruna, gotong royong, posyandu, pembuatan tong sampah organik dan anorganik, perbaikan gapura desa, lomba 17 Agustus, kegiatan Maulid Nabi	hari lainnya

Kegiatan pada kategori terakhir tidak dirancang sebagai program pelayanan administrasi, tetapi penting sebagai dasar hubungan kerja dan kepercayaan antara mahasiswa, perangkat desa, dan warga (Bagian 3.4).

Dukungan terhadap Pelayanan Administrasi dan Pelayanan kepada Warga

Dukungan langsung terhadap pelayanan di Desa Jaranguda dilakukan melalui tiga bentuk. Pertama, penginputan data SPPT PBB. Sejak hari ke-10, mahasiswa membantu perangkat desa menginput data SPPT PBB warga di kantor desa. Pekerjaan ini berlangsung selama sekitar dua minggu dan mencakup sekitar 300 data. Perangkat desa tidak menetapkan tenggat untuk pekerjaan ini. Sebelum pekerjaan dimulai, Kepala Desa memberikan arahan kepada mahasiswa (Gambar 1).



Gambar 1. Kepala Desa memberikan arahan kepada mahasiswa KKN sebelum pekerjaan SPPT PBB. *Sumber: dokumentasi penulis, 2026.*

Kedua, penyaluran bantuan sosial. Mahasiswa dari dua kelompok KKN membantu perangkat desa menyiapkan dan menyalurkan bantuan sosial ke rumah-rumah warga, berupa beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, dan gula 1 kg per paket (Gambar 2).

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 443 - 449 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.6010 ***e*-ISSN : 2807-6907**



Gambar 2. Mahasiswa KKN dan perangkat desa bersiap menyalurkan bantuan sosial di Desa Jaranguda. *Sumber: dokumentasi penulis, 2026.*

Ketiga, bantuan pekerjaan kantor. Pada hari ke-30, mahasiswa membantu perangkat desa di kantor desa. Mahasiswa bersama kelompok KKN lain juga membersihkan dan menata aula yang berfungsi sebagai perpustakaan desa (hari ke-6) dan kantor desa untuk acara penutupan (hari ke-35).

Bentuk dukungan ini sejalan dengan literatur bahwa pelayanan administrasi merupakan peran utama pemerintah desa [2] dan bahwa pengelolaan data dan dokumen yang tertib mendukung kecepatan pelayanan serta akuntabilitas [7], [8]. Pada pelayanan PBB, Munanto [12] mencatat bahwa pemungutan PBB di desa kerap terkendala data yang kurang valid dan keterbatasan sumber daya manusia. Dalam kerangka itu, bantuan penginputan sekitar 300 data SPPT dapat dipahami sebagai upaya meringankan beban kerja perangkat desa (interpretasi penulis). Perlu ditegaskan bahwa kontribusi ini bersifat pendukung. Mahasiswa tidak mengubah sistem, prosedur, atau kewenangan pelayanan desa, dan pekerjaan penginputan hanya menyentuh sebagian kecil rangkaian pengelolaan PBB. Istilah "optimalisasi" dalam judul karena itu dimaknai sebagai upaya membantu memperlancar pekerjaan administrasi, bukan perbaikan sistem pelayanan secara menyeluruh.

Penguatan Ekonomi Warga melalui Sosialisasi UMKM dan Pelatihan Pembuatan Sabun

Pada hari ke-10, mahasiswa memberikan sosialisasi UMKM dan mengajari ibu-ibu, termasuk lansia peserta senam pagi, membuat sabun dengan modal kecil. Materi menekankan bahwa produk yang dijual kembali dapat memberi keuntungan sekitar tiga sampai lima kali lipat dari modal.

Pelatihan semacam ini banyak dilakukan dalam kegiatan KKN dan pengabdian di berbagai desa. Sundari dkk. [13] melaporkan bahwa pelatihan pembuatan sabun cuci piring di Desa Kuala Bhee memberi keterampilan baru, membuka wawasan peluang usaha, dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga. Kegiatan serupa dilaporkan pula oleh Lestari dkk. [14] dan Sari dan Diawati [15]. Kegiatan di Jaranguda memiliki tujuan yang sama, yaitu memberi warga alternatif usaha rumah tangga dengan modal terjangkau. Dalam kerangka tata kelola ekonomi desa, kegiatan ini memberi contoh bahwa pemerintah desa dapat menjadikan pelatihan keterampilan sebagai bagian dari pengembangan UMKM lokal.

Keterbatasannya jelas. Pelatihan dilakukan satu kali, sehingga belum dapat dipastikan apakah warga melanjutkan produksi, dan tidak ada pengukuran sebelum-sesudah terhadap keterampilan maupun pendapatan.

Kegiatan Sosial-Keagamaan, Kepemudaan, dan Lingkungan sebagai Penopang Hubungan dengan Warga

Sebagian besar hari KKN diisi kegiatan yang tidak langsung berkaitan dengan administrasi, seperti mengajar mengaji sore hari, mengikuti perwiritan, senam pagi bersama

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 443 - 449 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.6010 ***e*-ISSN : 2807-6907**

lansia, membantu posyandu, kerja bakti, dan rapat dengan karang taruna untuk lomba 17 Agustus dan lomba Maulid Nabi. Mahasiswa juga membantu pembuatan tong sampah organik dan anorganik yang ditempatkan di depan kantor desa (Gambar 3) serta memperbaiki gapura desa.



Gambar 3. Mahasiswa KKN dan perangkat desa bersama tong sampah organik dan anorganik di depan kantor desa. *Sumber: dokumentasi penulis, 2026.*

Kegiatan-kegiatan ini berfungsi sebagai sarana membangun kepercayaan, yang tampak dari penerimaan warga terhadap mahasiswa dan kesediaan perangkat desa melibatkan mahasiswa dalam pekerjaan kantor. Hal ini sejalan dengan temuan Hardi dkk. [1] bahwa dukungan dan keterlibatan warga dalam proses desa, misalnya melalui musyawarah, mendukung berjalannya tata kelola administrasi. Sebaliknya, kasus Pematang Johar menunjukkan bahwa layanan yang dirancang tanpa memperhatikan kemampuan warga dapat gagal berjalan [6]. Karena itu, pendekatan sosial selama KKN dipandang sebagai syarat awal agar kegiatan pendampingan dapat diterima. Catatan: hubungan ini merupakan interpretasi penulis berdasarkan observasi dan tidak diukur.

Persepsi Kebermanfaatan

Selama kegiatan, warga menyampaikan bahwa kehadiran dan kegiatan mahasiswa membantu serta mempermudah aktivitas mereka. Penilaian ini bersifat persepsi lisan dan tidak diukur dengan kuesioner atau wawancara terstruktur, sehingga tidak dapat digeneralisasi.

Implikasi bagi Tata Kelola Ekonomi Desa yang Berkelanjutan

Kegiatan KKN di Desa Jaranguda memberi gambaran bahwa tata kelola ekonomi desa memerlukan dua fondasi. Fondasi pertama adalah pelayanan administrasi yang tertib, mencakup pendataan, pengarsipan, dan prosedur layanan yang jelas [1], [7], [8]. Fondasi kedua adalah warga yang memiliki keterampilan produktif [13]. Keberlanjutan keduanya bergantung pada kelanjutan peran perangkat desa, bukan mahasiswa yang hanya hadir 35 hari.

Rekomendasi untuk keberlanjutan adalah: (a) pemerintah desa melanjutkan pendataan dan penataan dokumen, termasuk pengarsipan data SPPT yang telah diinput dan penyusunan SOP layanan sederhana [9], [10]; (b) pemerintah desa atau pihak terkait memfasilitasi kelompok ibu-ibu yang berminat melanjutkan produksi sabun; dan (c) kelompok KKN berikutnya melanjutkan dengan pengukuran yang lebih jelas, misalnya waktu layanan dan jumlah warga terlayani.

Keterbatasan. Artikel ini tidak memiliki data kuantitatif selain jumlah data SPPT yang diinput, tidak ada pembanding sebelum dan sesudah kegiatan, dan pencatatan persepsi warga belum sistematis. Kontribusi terhadap pelayanan administrasi dan ekonomi hanya terwakili oleh beberapa kegiatan utama (penginputan SPPT PBB, bantuan penyaluran bansos, dan pelatihan

Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 443 - 449 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.6010 ***e*-ISSN : 2807-6907**

sabun), sehingga temuan tidak dapat diartikan sebagai perbaikan menyeluruh pada tata kelola desa.

4. SIMPULAN

KKN di Desa Jaranguda memberikan kontribusi pendukung bagi pelayanan administrasi desa melalui bantuan penginputan sekitar 300 data SPPT PBB selama kurang lebih dua minggu, bantuan penyaluran bantuan sosial bersama perangkat desa, dan bantuan pekerjaan kantor desa, serta kontribusi bagi penguatan ekonomi warga melalui sosialisasi UMKM dan pelatihan pembuatan sabun. Kegiatan sosial-keagamaan, kepemudaan, dan lingkungan membangun kepercayaan yang memudahkan mahasiswa bekerja bersama perangkat desa dan warga. Warga menyatakan merasa terbantu, tetapi kebermanfaatan ini belum diukur secara terstruktur. Keberlanjutan hasil kegiatan bergantung pada komitmen pemerintah desa dan pendampingan lanjutan. Penelitian atau KKN berikutnya disarankan memasukkan wawancara terstruktur, pengukuran waktu dan jumlah layanan, serta pemantauan usaha warga setelah pelatihan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan di Desa Jaranguda, pemerintah desa disarankan menyimpan dan memperbarui data SPPT PBB yang telah diinput secara tertib, serta menyusun prosedur layanan sederhana dan memasang informasi persyaratan layanan di kantor desa agar kepastian pelayanan terjaga [8], [10]. Bagi warga yang berminat melanjutkan produksi sabun, pemerintah desa dapat memfasilitasinya melalui pendampingan lanjutan dan pencatatan modal serta hasil penjualan, sehingga manfaat ekonominya dapat dibuktikan dengan data nyata. Bagi kelompok KKN berikutnya, disarankan melanjutkan program yang telah dirintis dengan pengukuran yang lebih jelas, seperti waktu layanan dan jumlah warga terlayani, serta menyertakan pendampingan setelah pelatihan. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan wawancara terstruktur dan survei kepuasan masyarakat agar dampak kegiatan dapat diukur secara lebih objektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan perangkat Desa Jaranguda, pengurus masjid, karang taruna, masyarakat, dosen pembimbing Dr. Sapri, S.Ag., M.A., serta LP2M UINSU.

DAFTAR PUSTAKA

[1] H. Hardi, J. T. Arifianto, M. I. D. Lestari, E. Trianti, D. A. P. Patricia, and V. Vena, “Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah,” *J. Sociopolitico*, vol. 6, no. 2, pp. 143–152, 2024, doi: 10.54683/sociopolitico.v6i2.139.

[2] S. Y. Mozin and R. Isa, “Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa,” *J. Pengabdi. Masy. Bangsa*, vol. 1, no. 4, pp. 150–155, 2023, doi: 10.59837/jpmba.v1i4.75.

[3] G. R. Telaumbanua, S. Waruwu, and D. Lase, “Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik,” *J. Akuntansi, Manaj. Dan Ekon.*, vol. 1, no. 2, pp. 303–311, 2022, doi: 10.56248/jamane.v1i2.45.

[4] M. H. Waruwu, S. Gulo, P. Lahagu, O. Halawa, and O. Laia, “Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Dan Keuangan,” *J. Akuntansi, Manaj. Dan Ekon.*, vol. 2, no. 1, pp. 44–47, 2023, doi: 10.56248/jamane.v2i1.74.

[5] K. Ali and A. Saputra, “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar,” *War. Dharmawangsa*, vol. 14, no. 4, pp. 602–614, 2020, doi: 10.46576/wdw.v14i4.891.

[6] S. Hajar, K. Ali, and A. Saputra, “Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Pematang Johar,” *J. Ilm. Muqoddimah J. Ilmu Sos. Polit.*

Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 443 - 449 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.6010 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Dan Hum., vol. 6, no. 1, pp. 136–142, 2022, doi: 10.31604/jim.v6i1.2022.136-142.

[7] S. Ferlita, W. M. Amalia, and J. Lutfi, "Pendampingan Tata Kelola Pemerintahanan Desa Melalui Pengarsipan Dokumen Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang," *Aksi Kita J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 4, pp. 921–927, 2025, doi: 10.63822/7nqemh63.

[8] R. Astuti, S. Salman, and M. Takdir, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat Di Desa Gantarang," *Soc. Sci. Acad.*, vol. 5, no. 2, pp. 301–322, 2026, doi: 10.37680/ssa.10258.

[9] S. Centia, Z. I. Zainuddin, and J. Q. Adinda FA, "Analisis Pengelolaan Arsip Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2024," *Responsive J. Pemikir. Dan Penelit. Adm. Sos. Hum. Dan Kebijak. Publik*, vol. 7, no. 2, pp. 76–85, 2024, doi: 10.24198/responsive.v7i2.56359.

[10] U. Jefri, L. U. Madina, S. Setyawati, and M. G. Alamsyah, "Peningkatan Pelayanan Administrasi Dan Informasi Melalui Pemasangan Banner SOP Di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang," *Indones. Collab. J. Community Serv.*, vol. 5, no. 3, pp. 267–274, 2025, doi: 10.53067/icjcs.v5i3.211.

[11] Mutiah and Y. Yustikasari, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan dan Penetapan Harga Pokok Produksi Sabun Cuci Piring Ramah Lingkungan bagi Kelompok PKK dan Pelaku UMKM di Kelurahan Meruya Utara Jakarta Barat," *J. Pengabdi. Kpd. Masy. Nusant.*, vol. 6, no. 3, pp. 4815–4819, 2025, doi: 10.55338/jpkmn.v6i3.6280.

[12] Munanto, "Kinerja Perangkat Desa Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Wilayah Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal," *Public Policy Manag. Inq.*, vol. 6, no. 2, pp. 584–595, 2022, doi: 10.20884/1.ppmi.2022.6.2.6727.

[13] R. R. Sundari *et al.*, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuala Bhee Melalui Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring Untuk Pengembangkan Produk UMKM," *Aksi Kita J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 5, pp. 1356–1365, 2025, doi: 10.63822/xq9f8f11.

[14] M. S. Lestari, R. Ahya, and D. Suprapto, "Program Berkelanjutan Kelompok Masyarakat Desa Serut Untuk Tumbuh Kembang Melalui Pelatihan Pembuatan Sabun," *Sink. J. Pengabdi. Masy. UIKA Jaya*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2024, doi: 10.32832/jpmuj.v2i1.1944.

[15] M. N. Sari and P. Diawati, "Pemberdayaan UMKM Kostari Melalui Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring Dan Detergen, Berbasis Ramah Lingkungan Di Era Society 5.0," *Community Dev. J. J. Pengabdi. Masy.*, vol. 5, no. 4, pp. 7041–7046, 2024, doi: 10.31004/cdj.v5i4.32393.